

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi Produktif.**

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat menentukan arah perkembangan suatu desa, baik dari segi pembangunan desa maupun perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembangunan desa ataupun perkembangan masyarakat merupakan seluruh kegiatan pembangunan desa yang berlangsung dan juga unsur yang tidak bisa terlepas dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan desa atau masyarakat dapat di dorong oleh adanya peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pembangunan sumber daya manusia dan penumbuhan iklim yang bisa mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat khususnya pada peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Dengan demikian, maka peningkatan dan pembangunan swadaya ke desa swakarsa menuju ketingkat desa swasembada dapat tercapai. Namun usaha tersebut dapat tercapai apabila Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

beserta masyarakat saling kerja sama dan gotong royong karena peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan di desanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendalian dan tindak, semakin dirasakan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kenyataan ini telah menempatkan peranan LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi semakin dibutuhkan kehadirannya.

Menyadari akan hal itu, pemerintah kemudian memberikan kepercayaan yang semakin besar kepada masyarakat melalui wadah LPM untuk mengelola sejumlah program/kegiatan. Bahkan program-program pembangunan berasal dari berbagai instansi/lembaga, baik pemerintah maupun bukan pemerintah, semakin mengalir ke desa. Semua program tersebut mempunyai tujuan dan harapan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat. Pada sisi lain pula, kenyataan itu akan merupakan tantangan terhadap keberadaan LPM. Tantangan dalam pengertian, bagaimana tingkat kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan para pengurus LPM dan kelompok masyarakat sasaran program. Pemahaman arah dan tujuan suatu program saja belum cukup menjamin bagi kelangsungan program pembangunan. Oleh karena masih ada hal yang perlu dipahami benar, yakni makna dasar dari tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka LPM didesa wonggahu selalu melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha ekonomi produktif masyarakat seperti halnya pembentukan Kelompok Usaha

Bersama yakni pembuatan bunga sinetron . Dalam artian bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijaksanaannya.

5.1.2 Adapun kendala-kendala yang menyebabkan peran LPM dalam usaha ekonomi produktif masyarakat di Desa Wonggahu dalam rangka membantu pemerintah menurut beberapa responden adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Sumber Daya Manusia

Jika dikaji secara mendalam bahwa kunci keberhasilan LPM dalam menjalankan tugas dan perannya sangat tergantung pada sumber daya manusia, sebab sumber daya manusia merupakan unsur penggerak utama dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya pada usaha ekonomi produktif masyarakat. Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Hal ini cukup mendasar bahwa manusia dipandang sebagai pemeran utama bagi kesuksesan dalam organisasi pemerintah khususnya di LPM di desa Wonggahu

#### 1 Faktor Modal (dana)

Setiap usaha dalam bentuk apapun selalu membutuhkan modal untuk membiayai operasinya sehari-hari dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat membantu dalam usaha yang dijalankan. Hal ini merupakan

salah satu faktor penyebab dari LPM dalam usaha ekonomi produktif masyarakat di desa Wonggahu.

#### 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan LPM

Keberadaan suatu lembaga yang ada di desa adakalanya sebagai penopong dalam pembangunan desa. Tetapi, tidak selamanya lembaga yang ada di desa dapat diketahui oleh masyarakat sebagai lembaga yang bisa membantu mereka dalam menjalankan aktivitas juga kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu sosialisasi dari lembaga tersebut untuk bisa mengetahui keberadaan lembaga tersebut, sehingga proses perencanaan yang akan diprogramkan baik dari segi tujuan maupun manfaat agar dapat berjalan dengan baik.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

- 5.2.1 Diharapkan LPM dapat melakukan tugas dan fungsinya selaku lembaga masyarakat yang berperan merencanakan dan melakukan pembangunan di desanya sehingga mampu memberikan peranbatunya secara nyata terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa
- 5.2.2 Diharapkan LPM kedepan dapat selalu meningkatkan kebutuhan dan kemakmuran rakyat guna pengembangan desa dan kemakmuran masyarakat yang madani juga mencapai kemandirian yang hakiki.
- 5.2.3 Diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat LPM melalui pelatihan dan seminar serta mengikuti pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Agussyafii**, <http://mubarak-intitute.blogspot.com:2008>

**Aswar**

2004. *Skripsi, (Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Generasi Muda)*. Gorontalo: UNG

**Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**. 2000. *Anggaran Dasar (Temu LKMD Tingkat Nasional)*. Bandung

**Beratha, I Nyoman**

1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara

**Depdagri, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa**

1996. *Panduan dan Berbagai Program Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : PT Penebar Swadaya

**Kurniawan, Iwan**

2001. *Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta : LEPIN.

**Maleong, Lexy J.**

2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

**Mardi Yatmo Hutomo** (dalam <http://.bapenas.go.id:2008>)

**Marjo, Ys**

1976. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Surabaya : Bintang Jaya

**Nasution**

1998. *Metode Penelitian Naturalistik Pelaksanaan*. Jogjakarta: Tarsito

**Nasir, Moh**

1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

**Pamudi S. Himawa**

2002. *Politik Pemberdayaan*. LAPEERA Pustaka. Jogjakarta.

**Pemerintah Desa dan Kelurahan**. 2006. *Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan*. Bandung. Fokus Media

**Poerwardarminta, W. J. S**

1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

**PEMKAB**

2001. *Perda. Kabupaten Boalemo No. 66 Tahun 2001 (Pedoman Pembentukan Lembaga Pe 65 yaan Masyarakat Desa)*. Boalemo : Bag. Hukum, Sekretariat Kabup: alemo.

**Soekanto** 1984[http://www.Acheh-eye.org/data\\_files/bahasa\\_format/ngo\\_bhs/ngo\\_ylbhi\\_2006\\_07.html](http://www.Acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/ngo_bhs/ngo_ylbhi_2006_07.html)).

**Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

**UNDP** (<http://F:/Peace%20Studies.htm>.2008).